

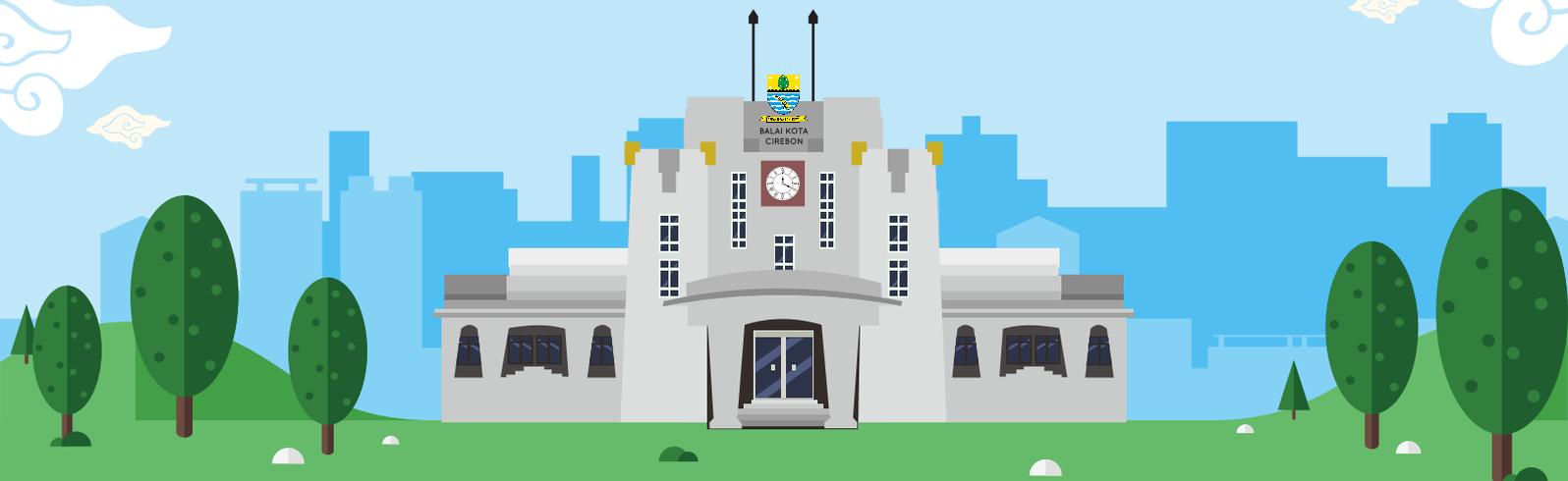


Dinas Komunikasi
Informatika dan Statistik



E-KLIPING

SURAT KABAR HARIAN
RABU, 29 JANUARI 2020

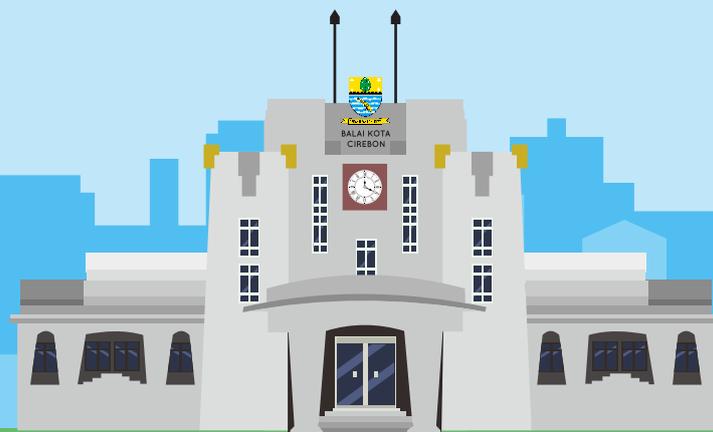


TOPIK BERITA HARI INI

- **Disnaker Pantau Tenaga Asing China**
- **Anggaran Terbatas, Data KIA Baru Dicitak 50%**
- **Legalitas Sewa Surya Toserba Rajawali Kembali Dipertanyakan**
- **Mau Tidak Mau (One Way)**
- **IAIN Cirebon Siap Bangun Selter PKL**
- **Selesai Dirakit, PDU segera Beroperasi**
- **Sistem Perjanjian Kurangi Antrean**
- **Jalur Prestasi Ditambah Jadi 30 Persen**
- **Disdik Bakal Renovasi Ruang Kelas SD Negeri Lebakngok**
- **SMP Negeri 1 Kota Cirebon Siap Gelar Pengajian Akbar**

INFO HOAX

- **Informasi Jasa Pembuatan SIM Resmi Kepolisian dengan Daftar Harganya**
- **Himbauan Kemenke RI Tentang Merebaknya Virus Influenza**



RABU
29 JANUARI 2020
5 JUMADIL AKHIR 1441 H
LAYANAN IKLAN
0231.200012
08122292369
LAYANAN SIRKULASI
081320726703/0231.232979

HARIAN UMUM
Kabar Cirebon

Mitra Dialog Terpercaya



Agus Sukmanjaya

Disnaker Pantau Tenaga Asing dari China

KESAMBI, (KC).-

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cirebon memantau tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di K o t a

Cirebon. Saat ini ada sebanyak 21 TKA yang bekerja di Kota Cirebon, enam di antaranya berasal dari China.

Sementara untuk pengawasan, dilakukan oleh Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) yang terdiri dari berbagai instansi, yakni Kejaksaan, Imigrasi serta pemerintah daerah. Kepala Disnaker Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya mengatakan, secara rutin pe-

rusahaan yang mempekerjakan TKA ini melaporkan kepada Tim Pora tersebut.

"Itu data sampai 2019 lalu, total ada 21 TKA, enam di antaranya dari China. Untuk pengawasan dari kita itu tergabung dalam tim Pora," kata Agus Sukmanjaya, Selasa (28/1/2020).

Agus memastikan enam TKA dari China

♦ Ke halaman 7

Disnaker... dari halaman 1

sudah tinggal lama dan bekerja lama di Kota Cirebon, sebelum virus Corona menyerang China belakangan ini. Menurut Agus, jika ada TKA baru atau pergantian TKA termasuk dari China, maka akan ada perusahaan yang melaporkan ke Disnaker.

"Sebelum virus itu menyebar mereka sudah kerja di sini. Jadi bisa dikatakan mereka aman," katanya.

Agus menambahkan, Tim Pora juga melakukan monitoring ke perusahaan yang mempekerjakan TKA secara

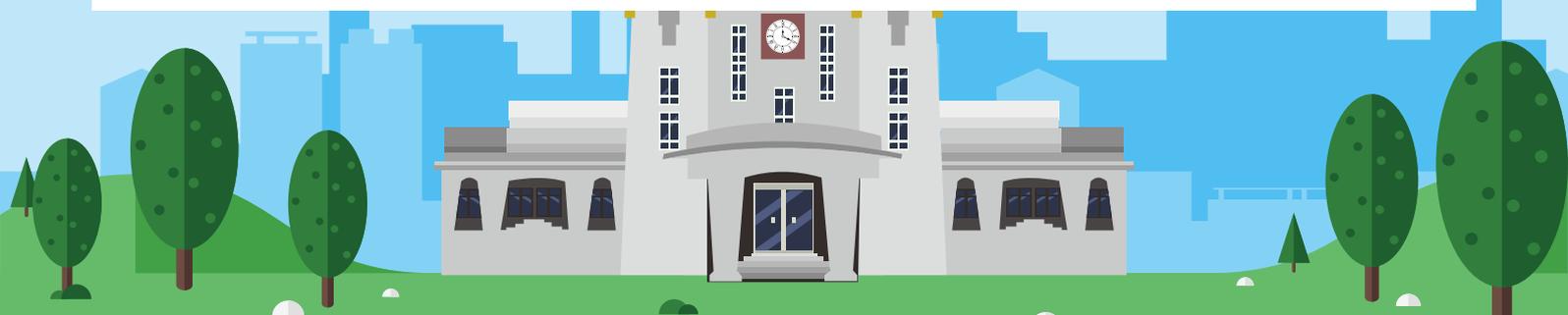
rutin tiga bulan sekali. Namun, masing-masing instansi di dalam Tim Pora juga rutin melakukan monitoring. Disnaker sendiri sudah memetakan TKA yang bekerja di Kota Cirebon, termasuk TKA dari China.

"Hasil pemetaan TKA yang bekerja di Kota Cirebon kebanyakan tenaga pendidik, terutama di sekolah swasta," ungkapnya.

Sementara itu, saat ini terdapat 289 warga Kota Cirebon yang bekerja di luar

negeri. Dari ratusan warga tersebut, Agus mengatakan tidak ada satu pun warga Kota Cirebon yang bekerja di China. Jika ada warga Kota Cirebon yang ingin bekerja di China, maka Disnaker akan memberikan imbauan kepada calon pekerja untuk lebih berhati-hati.

"Kewenangan larangan ada di pusat. Kita di daerah lebih antisipasi saja dan ikuti perkembangan di media. Yang keluar banyaknya ke Taiwan, tapi kalau ada saat proses rekomendasi pembuatan paspor di situ ada sesi wawancara dan kita akan ing a t k a n , " imbuhnya. (Iskandar/KC)



RABU
29 JANUARI 2020
5 JUMADIL AKHIR 1441 H
LAYANAN IKLAN
0231.200012
08122252369
LAYANAN SIRKULASI
081320726703/0231.232979

HARIAN UMUM
Kabar Cirebon

Mitra Dialog Terpercaya

Anggaran Terbatas, Data KIA Baru Dicitak 50%

KEJAKSAN, (KC).-

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cirebon mencatat sudah hampir 50 persen Kartu Indonesia Anak (KIA) dicetak. Catatan tersebut berdasarkan data dari jumlah anak usia 0-5 tahun.

Proses pencetakan KIA sendiri terbilang mudah, soalnya berbarengan dengan proses pencetakan akte kelahiran anak. Hal itu dinilai memudahkan bagi para orang tua yang ingin membuat KIA untuk anaknya yang baru lahir.

Kepala Disdukcapil Kota Cirebon, Atang Hasan Dahlan mengatakan, dari total 26.924 anak usia 0-5 tahun di Kota Cirebon, sebanyak 18.474 sudah mencetak KIA. Sementara sisanya,

sampai saat ini belum memiliki ataupun mencetak KIA. Pencetakan KIA sendiri dibagi dalam dua periode.

"Periode pertama itu 0-5 tahun dan selanjutnya 5-17 tahun kurang satu hari. Saat ini yang periode pertama sudah 50 persen," kata Atang, Selasa (28/1/2020).

Atang mengakui saat ini ada kendala yang membuat proses pencetakan KIA terhambat. Salah satu kendalanya yakni rusaknya reborn atau mesin pencetak tinta untuk mencetak KIA. Menurutnya, kurangnya anggaran untuk mesin pencetak dan tinta membuat pencetakan menjadi terbatas.

"Karena anggaran belum ada dan sulit jadi masih terbatas.

◆ Ke halaman 7



Josa/KC

SEORANG anak menunjukkan Kartu Indonesia Anak (KIA) yang diterimanya belum lama ini. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cirebon mencatat sudah hampir 50 persen KIA dicetak.*

Anggaran... dari halaman 1

Jadi kita pinjam dulu ke kabupaten saat ada pemohon yang membuat KIA," katanya.

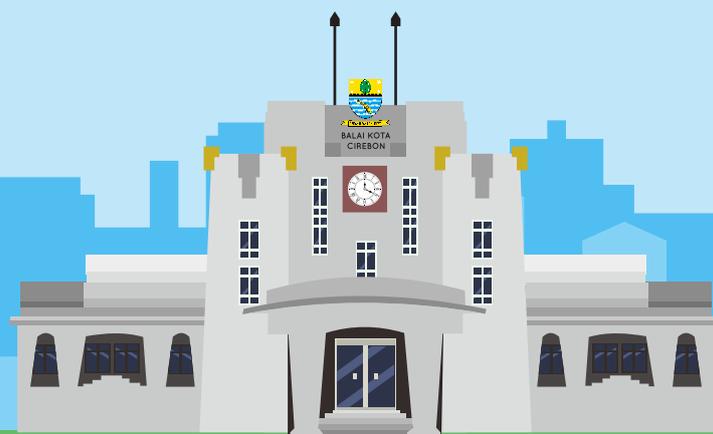
Atang juga mengatakan, dengan rusaknya mesin pencetak ini membuat pemohon yang ingin membuat

KIA harus menunggu hingga kembali normal. Namun, untuk blangko KIA tersedia mencukupi, karena permintaan tidak seperti KTP elektronik.

KIA menurut Atang dibutuhkan oleh orang tua saat

berpergian ke luar kota dan luar negeri. Biasanya petugas di bandara akan menanyakan anak tersebut memiliki KIA atau tidak.

"Ya itu banyak manfaatnya, salah satunya menegaskan anak itu masih belum cukup umur. Artinya, misal kita naik pesawat itu si anak belum dikenakan biaya," imbuhnya. (Iskandar/KC)



RABU
29 JANUARI 2020
5 JUMADIL AKHIR 1441 H
LAYANAN IKLAN
0231.200012
08122292389
LAYANAN SIRKULASI
081320726703/0231.232979

HARIAN UMUM

Kabar Cirebon

Mitra Dialog Terpercaya

Legalitas Sewa Surya Toserba Rajawali Kembali Dipertanyakan



Epih/KC

SELAIN belum memiliki izin resmi, ternyata Surya Toserba Rajawali Kota Cirebon juga belum memiliki keabsahan maupun legalitas Notaris atas sewa menyewa bangunan gedung yang ditempatinya sekarang ini.*

CIREBON, (KC).-

Selain belum memiliki izin resmi, ternyata Surya Toserba Rajawali Kota Cirebon juga belum memiliki keabsahan maupun legalitas notaris atas sewa menyewa bangunan gedung yang ditempatinya sekarang ini. Padahal, pusat perbelanjaan berlokasi di Jalan Rajawali Raya ini sudah lebih dua tahun beroperasi.

"Berkaitan hal itu, kami telah menindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan dengan instansi terkait dan klarifikasi kepada pihak Surya Toserba Rajawali. Dengan adanya penemuan

ini kami juga telah melayangkan surat kepada SKPD terkait, agar melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian langsung terhadap Surya Toserba Rajawali," tegas Sekertaris

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Cirebon, Icip Suryadi, kemarin.

Terkait somasi dilayangkan DPC Pemuda Demokrat Indonesia Kota Cirebon mengenai belum memiliki izinnya Surya Toserba Rajawali, Icip kembali menegaskan, telah menindaklanjutinya.

"Dalam hal ini kami mau-paun dari pihak DPMPSTP Kota Cirebon hanya melaksanakan pelayanan perizinan secara administrasi, sedangkan dalam hal pengawasan dan tindakan menjadi tanggung jawab perangkat daerah teknis masing-masing," ujarnya.

Sebelumnya dari surat hasil keputusan rapat pembahasan klarifikasi yang

diterima KC dan dihadiri sejumlah instansi di Kantor DPMPSTP terungkap, dugaan kuat Surya Toserba Rajawali belum melengkapi perizinan resmi.

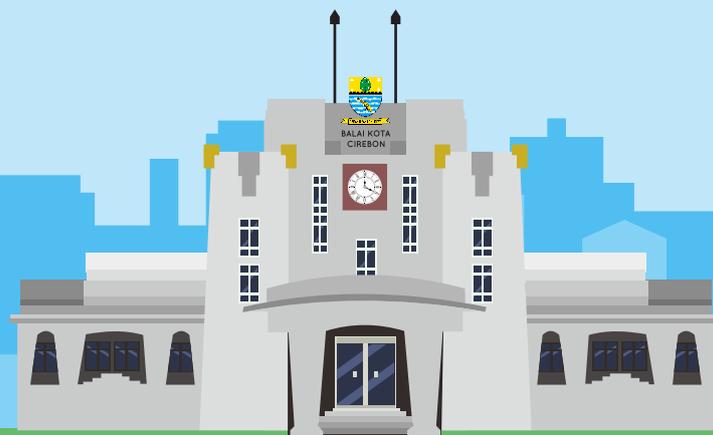
"Setiap pengusaha yang akan membuat usaha baru diwajibkan membuat dokumen lingkungan. Apalagi, Surya Toserba Rajawali ini sudah melakukan kegiatan usahanya selama dua tahun dan tidak memiliki izin, perlu dikenakan teguran dan sanksi tegas," ujar Dwi Yanti dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon, dalam rapat tersebut.

Sementara itu, tersiar kabar bahwasanya Surya Toserba Rajawali tidak bisa memiliki izin lantaran terbentur aturan maupun keabsahan legalitas notaris bagi

proses sewa menyewa bangunan gedung yang ditempatinya sekarang ini.

Hal itu dibenarkan General Manager Cietos, Pengelola Gedung Surya Toserba Rajawali, Rudi. Menurutnya, keabsahan legalitas notaris untuk sewa menyewa gedung sampai dengan saat ini belum dimiliki Surya Toserba.

"Ini (proses legalitas sewa, menyewa, Red) sebenarnya sebagai syarat resmi untuk bisa mengajukan dan memperoleh berbagai perizinan usaha. Selain itu, kami juga sebenarnya sudah sejak lama ingin membantu proses itu. Akan tetapi, dari pihak yang bersangkutan (Surya Toserba) tampaknya belum ada keinginan untuk bisa menyelesaikan proses tersebut," ujarnya.(Epih/KC)



Radars Cirebon

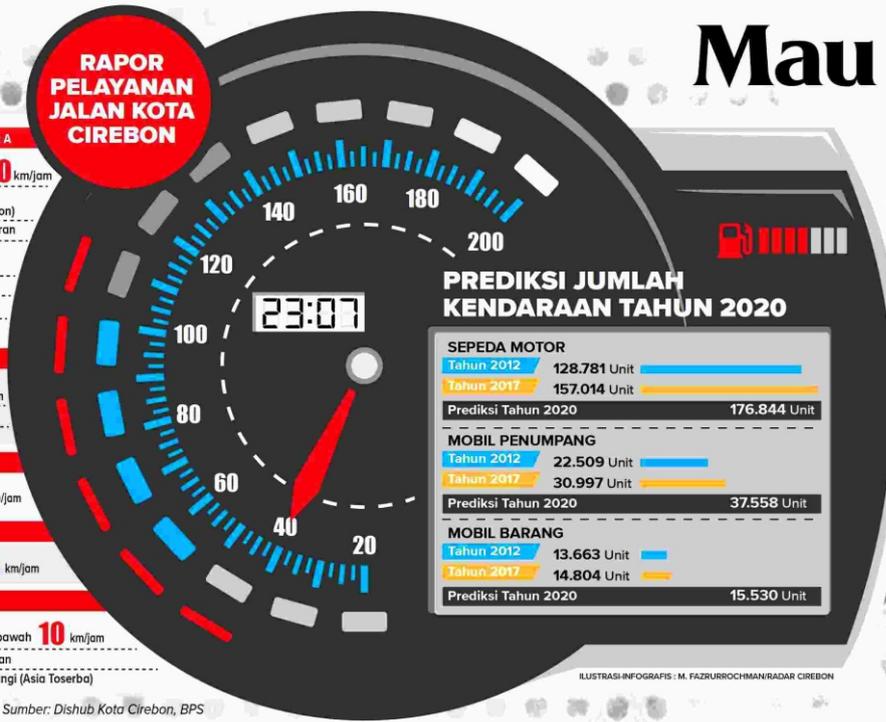
Koran Juara!

RABU WAGE, 29 JANUARI 2020 • 4 JUMADIL AKHIR 1441 HURIYAH

RAPOR PELAYANAN JALAN KOTA CIREBON

Peringkat A	Kecepatan rata-rata 40 km/jam
Jl Siliwangi (Balai Kota Cirebon)	
Fly Over Pegambiran	
Jl Kesambi Raya (TPU Jabang Bayi)	
Jl Yos Sudarso	
Jl Kalijaga	
Jl Samadikun	
Peringkat B	Kecepatan rata-rata 30 km/jam
Jl Dr Cipto Mk	
Jl Pemuda	
Peringkat C	Kecepatan rata-rata 20 km/jam
Peringkat D	Kecepatan rata-rata 10 km/jam
Peringkat E	Kecepatan rata-rata dibawah 10 km/jam
Jl Pekiringan	
Jl Siliwangi (Asia Toserba)	

Sumber: Dishub Kota Cirebon, BPS



ILUSTRASI-INFOGRAPIS : M. FAZRURROCHMAN/RADAR CIREBON

Mau Tidak Mau (One Way)

Kualitas Pelayanan Jalan Kota Cirebon Menurun

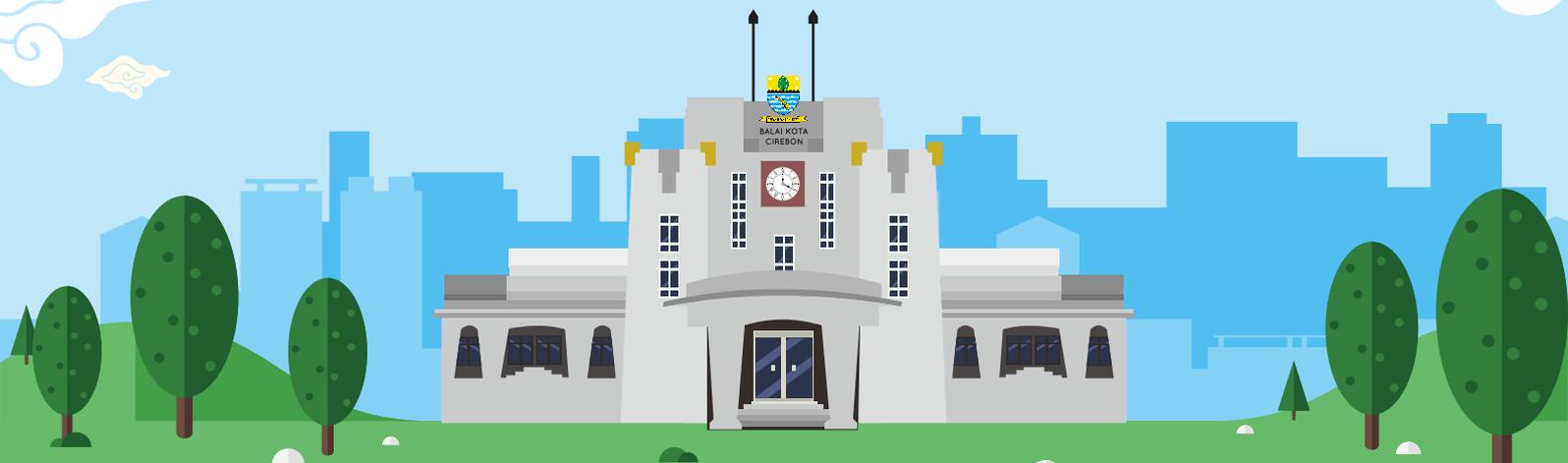
KESAMBI - Solusi penanganan kemacetan lalu lintas di Kota Cirebon perlu segera dipikirkan. Dalam data laju pertumbuhan dan prediksi jumlah kendaraan di Kota Cirebon, tercatat penambahan signifikan kendaraan baik roda empat maupun dua.

► Ke Halaman...19



OKRI RYANA/RADAR CIREBON

SATU ARAH: Lalu lintas kendaraan dan parkir badan jalan di Jl Pekalipan. Penanganan kemacetan di Kota Cirebon perlu dilakukan segera seiring terus bertumbuhnya kawasan perkotaan dan peningkatan kepemilikan kendaraan.



Mau Tidak...

► Dari Halaman...13

Terlambat bergerak, dalam tahun-tahun mendatang kemacetan yang lebih parah bakal sulit terhindarkan.

Merujuk data laju pertumbuhan kendaraan Kota Cirebon, jumlah sepeda motor diprediksi meningkat menjadi 176.844 unit di tahun 2020. Sedangkan mobil penumpang diprediksi menjadi 37.558 unit di tahun 2020.

Padahal, dibandingkan data yang sama pada tahun 2012 di Kota Cirebon hanya terdapat 22.509 unit mobil penumpang dan tahun 2017 jumlahnya menjadi 30.997 unit.

Namun merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, jumlah kendaraan roda empat Kota Cirebon mencapai 50.729. Data ini terakhir diperbaharui 19 Maret 2018 dengan bersumber pada BPKB menurut cabang pelayanan di Jawa Barat.

Peningkatan volume kendaraan dan kemacetan juga berkorelasi dengan tingkat pelayanan jalan di Kota Cirebon. Seperti diketahui, kecepatan rata-rata kendaraan di sejumlah ruas jalan terus menurun.

Merujuk pada Data Pelayanan Jalan Kota Cirebon, ruas jalan yang berkategori A, saat ini dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata 40 kilometer per jam.

Sebaliknya, di peringkat E, kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan di bawah 10 kilometer per jam. Kasus pelayanan kategori E ini terjadi di Jl Pekiringan dan Jl Siliwangi (Asia Toserba).

Hingga saat ini, Dinas Perhubungan (Dishub) telah merencanakan opsi untuk meminimalisasi kemacetan

dengan penerapan jalan satu arah. Kepala Dishub, Ir H Yoyon Indrayana MT menyatakan kepada *Radar* bahwa opsi satu arah patut ditempuh untuk mengurangi kemacetan. Namun sayang, kajiannya belum terbiayai dalam APBD setidaknya sampai di tahun anggaran berjalan.

Meksi *one way* masih menjadi pro kontra, Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Ir H Watid Syahriar menilai, penerapan jalur satu arah merupakan pemecahan solusi yang paling murah. *One way* sudah seharusnya diterapkan di Kota Cirebon. Mengingat volume kendaraan yang ada, telah melampaui volume atau lebar jalan. "Jadi kapasitas (jalan, *red*) sudah kurang memadai. Mau tidak mau (*one way*). Pelebaran (jalan) *kan* sesuatu yang rasanya tidak mungkin," kata Watid, Selasa (28/1).

Watid menilai, solusi mengurangi kemacetan yang dicanangkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon, sudah tepat. Namun disadari, perlu dilakukan kajian secara komprehensif. Salah satunya dengan mempertimbangkan tata ruang. "Lalu lintas kaitannya dengan tata ruang. Jadi mau tidak mau harus ada satu kajian yang betul-betul (serius, *red*) sebelum satu arah itu di terapkan," tandasnya.

Komisi II DPRD Kota Cirebon, imbuh Watid, mendukung sepenuhnya langkah tersebut. Bila perlu disegerakan. Mengingat kota-kota lain seperti Semarang atau Surabaya, sudah memberlakukan

sistem ini. Dibarengi dengan meningkatkan kesadaran dan ketertiban pengendara. Hasilnya, kemacetan bisa dikurangi.

Sejauh ini, memang belum ada pembahasan terfokus terkait dengan penerapan *one way*. Meski dishub sudah membawa alternatif solusi ini adalah rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAH).

Kendati begitu, Ketua FLLAJ Kota Cirebon, Prof Dr Adang Djumhur Salikin MAg menilai, *one way* harus diiringi dengan kebijakan lain. Sebab, kemacetan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Selain infratukstur dan regulasi, diperlukan kesadaran untuk tertib dan berperilaku tidak melanggar.

Bukan hanya dari pengendara, namun juga warga lainnya. Ia mengatakan faktor lain yang membuat ruas jalan menyempit adalah pedagang kaki lima, parkir di badan jalan, dan sejumlah perilaku tidak tertib lainnya.

"Variabel kemacetan itu, tidak bisa diselesaikan parsial. Belum lagi kita bicara mengenai parkir sembarang, pedagang kaki lima," katanya.

Apa yang diungkapkan Adang, sesuai dengan data pelayanan jalan Kota Cirebon. Dua ruas jalan yang sudah menerapkan sistem satu arah, justru menjadi yang terburuk dalam kualitas layanannya. Jl Pekiringan dan Jl Siliwangi-Karanggetas hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata 7 kilometer/jam di puncak kesibukan. Kondisi ini tidak lepas dari keberadaan parkir badan jalan. (**awr/ade**)

Radar Cirebon

Koran Juara!

RABU WAGE, 29 JANUARI 2020 • 4 JUMADIL AKHIR 1441 HURIYAH

IAIN Cirebon Siap Bangun Selter PKL

KESAMBI - Masalah kepadatan lalu lintas yang terjadi di Jalan Perjuangan harus diatasi secara komprehensif. Dinas Perhubungan (Dishub) berencana memasang alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) pada tahun ini.

Namun begitu, kepadatan di Jalan Perjuangan tidak saja diakibatkan oleh lalu lintas kendaraan yang tersendat, tapi juga oleh aktivitas lain, seperti parkir di badan jalan dan pedagang kaki lima.

Berdasarkan pantauan *Radar*, sejak simpang Untag arah Majasem, telah banyak berjejer PKL yang menjajakan dagangannya di sepanjang Jalan Perjuangan. Khususnya di depan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

► Ke Halaman...19

IAIN Cirebon...

► Dari Halaman...13

Tepat di depan Kampus IAIN Sendiri tercatat ada lebih dari 40 PKL yang berjualan pada siang hari. 28 PKL di berada di sisi kanan dan 13 PKL berada di sisi kiri. PKL yang dihitung, hanya yang berada di Rumija (Ruang Milik Jalan) saja, yang meliputi badan jalan, trotoar dan atau drainase yang berada di bawahnya.

Kepala Bagian Umum dan Humas IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Imron Rosyadi mengatakan, wacana pembuatan selter atau *Food Court* untuk PKL yang berada di depan IAIN memang sudah dibicarakan. Pihaknya juga telah menyiapkan 3 lokasi yang berada di dalam lingkungan kampus. Yakni Gedung Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FITIK), Gedung Fakultas Syariah dan

di Gedung Pascasarjana.

"Tempatnya sudah kita siapkan. Total kapasitasnya 30 pedagang. Mudah mudahan tahun ini bisa segera terealisasi," kata Imron, kepada *Radar*, Selasa (28/1).

Ia melanjutkan, *food court* tersebut nantinya akan dibangun melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Sementara pengelolanya akan dilakukan oleh Koperasi. Berdasarkan pengamatan oleh pihaknya, khusus di depan kampus IAIN Cirebon terdapat sedikitnya 22 PKL. Jumlah itu menurutnya hanya yang berjualan disisi kanan saja. Atau yang tepat berada di depan kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Namun demikian, pihaknya juga mengaku masih memikirkan bagaimana

solusi supaya setelah PKL dimasukan, Jl Perjuangan terjamin dari kepadatan seperti yang biasa terjadi saat ini. "Kalau misalnya PKL lain dimasukan, apakah nantinya Jl Perjuangan akan lancar? Takutnya setelah yang lain dimasukan, datang PKL lain yang berjualan di situ. Itu yang sedang kita pikirkan," ungkapnya.

Kepala Bidang UKM Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disdagkop-UKM), Saefudin Jupri mengaku sudah memiliki kesepahaman dengan IAIN Syekh Nurjati terkait dengan lokasi PKL.

Diharapkan penataan ini segera dilakukan. Sehingga trotoar di Jl Perjuangan dapat dibersihkan dari aktivitas yang bukan semestinya. (**awr**)

Radars Cirebon

Koran Juara!

RABU WAGE, 29 JANUARI 2020 • 4 JUMADIL AKHIR 1441 HURIYAH

Selesai Dirakit, PDU segera Beroperasi

KESAMBI - Pemerintah Kota Cirebon menerima bantuan mesin daur ulang sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

► Ke Halaman...19



OKRI RIYANA/RADAR CIREBON

SEGERA: Tampak depan Gedung PDU di bekas lokasi TPS Dukuh Semar, Selasa (28/1).

Selesai Dirakit...

Pertengahan Februari ditargetkan akan mulai beroperasi yang lokasinya dipusatkan di Eks TPS Dukuh Semar yang akan dijadikan Pusat Daur Ulang Sampah (PDU).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Drs H RM Abdullah Syukur MSI mengatakan, bantuan dari KLHK telah selesai dilakukan perakitan. Sementara dalam waktu dekat, mesin-mesin tersebut akan dilakukan uji

coba terkait pemanfaatannya oleh operator atau petugas dari kementerian. Bila semua telah berjalan, akan dilakukan pelatihan operator kepada petugas dari DLH yang akan ditugaskan berjaga.

"Kita akan di latih oleh mereka dari kementerian, dan ketika semua telah siap, baru kita bisa *running*. Sekarang kan Januari, mungkin pertengahan Februari sudah bisa jalan dan dilaksanakan," kata Syukur kepada *Radars*,

Selasa (28/1).

Sebelumnya, Staf Pengelolaan Sampah KLHK, Rafi Nur menjelaskan, bantuan mesin pendaur ulang sampah yang tiba di Kota Cirebon sebanyak 11 unit. Diantaranya *conveyor* 3 unit, *conveyor feeder* 1 unit, mesin kompos 1 unit, ayakan 2 unit, mesin press hidrolik 1 unit, mesin cetak butiran 2 unit, dan fermentasi 1 unit.

Untuk selanjutnya, akan dilakukan pelatihan tentang tata cara pengoperasian mesin.

"Mesin pengelolaan sampah ini bisa untuk sampah organik dan anorganik, kecuali limbah cair tidak bisa," bebernya.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH, Gandi SSTP MSI menambahkan, DLH akan menyediakan operator. Selain itu, akan membentuk satuan kerja. "Ini baru tiba hibah dari kementerian. Kapasitasnya 5 ton perhari, dan akan dipisah pisah untuk organik dan anorganik," bebernya. (ade)

► Dari Halaman...13



Radars Cirebon

Koran Juara!

RABU WAGE, 29 JANUARI 2020 • 4 JUMADIL AKHIR 1441 HURIYAH

Sistem Perjanjian Kurangi Antrean

RSDGJ Sebut Durasi Tunggu Pasien Poliklinik Berkurang Signifikan

KESAMBI – Durasi antrean Poliklinik Rumah Sakit Daerah Gunung Jati (RSDGJ) Cirebon, sudah lama dikeluhkan pasien. Belakangan kembali mengemuka setelah inspeksi mendadak anggota Komisi III DPRD.

Direktur Utama RSDGJ, dr H Ismail Jamaludin SpOt mengaku sudah melakukan beberapa perbaikan. Durasi tunggu pasien di poliklinik juga kian berkurang. Saat ini, jumlah klinik untuk melayani kesehatan masyarakat 30 unit. Secara keseluruhan, klinik yang ada ditangani oleh 72 dokter spesialis.

“Tiap klinik bisa ditangani lebih dari satu dokter spesialis. Pasien yang dilayani cukup banyak,” kata Ismail, kepada *Radars*, Selasa (28/1).

Berdasarkan data RSDGJ, pada tahun 2019 jumlah pasien yang berobat ke poliklinik RSDGJ mencapai 185.477. Dengan rata-rata pasien setiap harinya 700 orang. Jumlah ini menurun dibanding tahun 2018 yang mencapai 207.160 pasien. Hal ini berhubungan dengan diberlakukannya sistem rujukan berjenjang oleh BPJS Kesehatan.



OKRI RIYANA/RADARS CIREBON

SABAR: Antrean pasien di Poliklinik RSD Gunung Jati, Selasa (28/1). Manajemen rumah sakit mengklaim telah mengurangi durasi antrean pasien.

Terkait pengelolaan antrean pasien, Ismail mengaku sudah banyak melakukan perubahan. Upaya yang dilakukan ini cukup signifikan mengurangi antrean adalah sistem perjanjian. Sistem ini dilaksanakan berdasarkan data, bahwa sekitar 87 persen adalah pasien kontrol, artinya akan kembali diperiksa.

Caranya adalah pasien yang berkunjung pada hari periksa, dapat melakukan perjanjian untuk pemeriksaan berikutnya. Dengan demikian pasien sudah mendapatkan nomor antrean untuk kontrol berikutnya.

Sistem ini juga meminimalisasi pasien kehabisan kuota, juga memungkinkan penyiapan dokumen rekam medis sehari sebelum kontrol. Sistem ini juga telah secara signifikan me-

ngurangi waktu tunggu pasien.

Berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) waktu tunggu pasien rawat jalan adalah 60 menit. Pada tahun 2019 telah mencapai rata-rata 124,9 menit, jauh lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya yang bisa mencapai 3-5 jam.

Bahkan pada tahun-tahun sebelumnya pasien atau keluarganya mulai datang jam 02.00 dini hari untuk mendapatkan antrean. Disebutkan Ismail, hal seperti itu sudah tidak terjadi lagi. Meski ia juga mengakui, masih ada pasien yang menunggu lama.

Berdasarkan data tahun 2019 waktu tunggu terlama sekitar 200 menit. Biasanya disebabkan karena hambatan teknis dan lainnya.

Sementara jam buka pe-

ngambilan nomor antrean non perjanjian adalah 06.30. Ini bersamaan dengan dibukanya loket pendaftaran.

Bagaimana rencana untuk terus mengurangi durasi antrean? Ismail mengaku akan mengimplementasikan pendaftaran online. Ini seperti yang disarankan oleh Komisi III DPRD Kota Cirebon. Selain itu juga untuk memenuhi standar akreditasi RS.

Namun perlu persiapan regulasi, alur dan sosialisasi. Sebelumnya telah dilakukan 2 kali pengembangan sistem pendaftaran online tetapi masih terkendala teknis, tapi sudah bisa diatasi.

Pada sistem pendaftaran online, pasien dapat melakukan pendaftaran mandiri. Dengan menggunakan gadget masing-masing. Kemudian datang ke RS untuk *check in*. Bahkan beberapa klinik dapat langsung melakukan checkin di klinik. Hal ini secara signifikan akan mengurangi waktu tunggu pasien.

Seperti diketahui, dalam inspeksi ke RSDGJ Komisi III meminta manajemen mengoptimalkan sistem *e-medical record*. Kemudian menerapkan sistem online, agar dapat meningkatkan pelayanan dan kepastian bagi pasien. Bahkan bila perlu diprioritaskan, apalagi bila pasien itu berasal dari Kota Cirebon sendiri. (**gus**)

RABU, 29 JANUARI 2020
Rakyat Cirebon



FOTOL NURUL FAJRI/RAKYAT CIREBON

KEBIJAKAN BARU. Kepala Disdik Kota Cirebon, Irawan Wahyono MPd, saat dikonfirmasi terkait persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), di ruang kerjanya, kemarin (28/1).



Sekarang draf rancangan perwali yang mengatur pelaksanaan PPDB sudah siap. Tinggal kita laporkan ke Pak Wali untuk dibahas lebih lanjut sebelum ditetapkan”

IRAWAN WAHYONO MPd
Kepala Disdik
Kota Cirebon



Jalur Prestasi Ditambah Jadi 30 Persen

Draf Perwali PPDB Sudah Siap, Ada Jalur Baru untuk ke Sekolah Negeri

CIREBON – Dinas Pendidikan Kota Cirebon menginginkan persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini lebih matang. Maka dari itu, regulasi yang mengatur pelaksanaan PPDB berupa peraturan walikota (perwali) akan dirampungkan dalam waktu dekat ini.

“Sekarang draf rancangan perwali yang mengatur pelaksanaan PPDB sudah siap. Tinggal kita laporkan ke Pak Wali untuk dibahas lebih lanjut sebelum ditetapkan,” ungkap Kepala Disdik Kota Cirebon, Irawan Wahyono MPd, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, kemarin (28/1).

Ke Halaman...11

Jalur Prestasi....

► Dari Halaman 1

Ia menjelaskan, Perwali tentang PPDB perlu segera diterbitkan agar pihaknya bisa melakukan persiapan dengan waktu yang relatif tidak mendesak. Rencananya, pada Jumat lusa draf perwali akan dilakukan uji publik. “Biar persiapan kita panjang, tidak mendadak,” ujarnya.

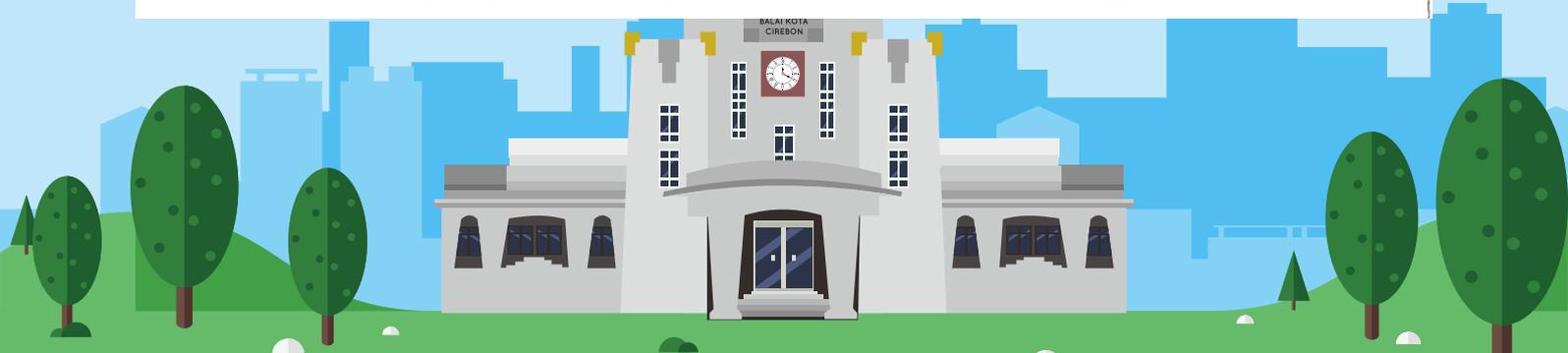
Lebih lanjut dijelaskan Irawan, porsi jalur PPDB pada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika pada tahun

sebelumnya jalur zonasi sebanyak 80 persen, kini hanya 50 persen. Kemudian jalur prestasi yang tahun sebelumnya sebanyak 15 persen, pada tahun ini meningkat menjadi 30 persen. Sedangkan jalur afirmasi yang sebelumnya 5 persen, kini menjadi 15 persen. Pada tahun ini, terdapat jalur baru, yaitu perpindahan dengan porsi 5 persen.

Ia juga menyampaikan, pelaksanaan PPDB secara online nantinya dilakukan di masing-masing sekolah. Pelaksanaannya

akan serentak antara sekolah negeri dan swasta. Sebagai upaya untuk mengubah persepsi masyarakat terkait sekolah favorit dan non-favorit, pihaknya akan membangun *branch image school*. Tiap SMP Negeri akan memiliki citra yang ditonjolkan.

“Misalnya sekolah robotik, sekolah literasi Alquran, sekolah olahraga, dan lainnya. Jadi nanti sekolah unggulan semua. Tidak ada sekolah favorit, karena dinas tidak pernah memutuskan hal itu,” katanya. (jri)



Fajar Cirebon

RABU - WAGE (29 JANUARI 2020 M / 04 JUMADIL AKHIR 1441 H)

Disdik Bakal Renovasi Ruang Kelas SD Negeri Lebakngok



RUANG KELAS SDN LEBAHNGOK AMBRUK. Kondisi Atap Kelas yang Ambruk.

Muslimin/FC.

KESAMBI, (FC) - Akibat hujan deras dan kondisi yang sudah lapuk, bangunan ruang kelas SD Negeri Lebahngok Argasunya Kota Cirebon tepatnya dibagian atap jebol.

Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu (25/1) malam, beruntung kondisi kelas dalam keadaan kosong.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon setelah mendapati laporan kejadian ambruknya kelas tersebut langsung turun beserta tim untuk meninjau dan

menganalisa kerusakan yang terjadi.

"Begitu tahu ada sekolah yang ambruk kami beserta tim langsung mendatangi lokasi tersebut, dan langsung kami juga analisa" ungkap Irawan kepada FC saat ditemui usai mengikuti kegiatan sagesious di SMA Negeri 1 Kota Cirebon, Selasa (28/1).

Menurut Irawan, untuk perbaikan ruang kelas tersebut tidak bisa menunggu anggaran dari APBD, maka pihaknya

mengambil terobosan untuk penanganan darurat. Hal itu dilakukan untuk segera memperbaiki ruang kelas agar bisa digunakan kembali.

Irawan mengakui, dirinya menyukai SD tersebut karena sangat dekat dengan alam. Pihaknya mengatakan, akan mempersiapkan SD Lebahngok sebagai Sekolah model alam.

"Bagus itu suasananya sangat bagus karena sumber belajarnya asli semua, jadi kalau sekolah mengajarkan tentang

pohon ada mengajarkan tentang air juga ada. Jadi saya suka sekali dengan sekolah itu, dan saya sudah siapkan untuk sekolah model alam," tambah Irawan.

Melihat potensi yang cukup bagus yang dimiliki oleh SDN Lebahngok, maka Disdik Kota Cirebon segera mengambil keputusan cepat agar nantinya apa yang telah direncanakan oleh Disdik Kota Cirebon dengan menjadikan Sekolah model alam bisa segera dilaksanakan. **(Muslimin)**

Fajar Cirebon

RABU - WAGE (29 JANUARI 2020 M / 04 JUMADIL AKHIR 1441 H)

SMP Negeri 1 Kota Cirebon Siap Gelar Pengajian Akbar

KEJAKSAN, (FC) - Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kota Cirebon bakal menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan pengajian akbar pada 30 Januari 2020 mendatang. Pengajian ini sebagai langkah antisipasi mencegah aksi tawuran antar pelajar yang sering terjadi, juga dalam rangka memberikan bimbingan mental kepada para pelajar.

Kegiatan yang digagas Satuan Binmas Polres Cirebon Kota ini melibatkan Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, dan juga Kodim 0614/Kota Cirebon. Dengan melibatkan peserta dari SMPN 1, SMPN 2, SMPN 5 dan SMP 27, SMP Wahidin Kota Cirebon akan diberikan tausiyah secara bergiliran dari pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

"Sesuai dengan yang telah disepakati bersama, kami akan menggelar pengajian akbar pada 30 Januari nanti. Pesertanya dari siswa SMP zona Kejaksan, kurang lebih 2000 peserta yang hadir," ujar Lilik Agus Darmawan Kepala Sekola SMPN 1 Kota Cirebon Kepada FC saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (28/1).

SMP Negeri 1 Kota Cirebon selaku tuan rumah menyambut baik kegiatan tersebut. Pihaknya sudah sangat siap walaupun harus menampung ribuan peserta yang hadir. Dengan sarana dan prasarana yang ada, SMPN 1 optimis mampu menggelar kegiatan dengan nuansa religi.

"Nanti kegiatan pengajian akan dilaksanakan dilapangan yang kami miliki, dan saya rasa cukup lah untuk menampung ribuan peserta. Kita akan libatkan semua siswa-siswi yang ada disini (SMPN 1) kalau untuk peserta lain mungkin perwakilan," tutur Lilik.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon Irawan Wahyono mengatakan, Disdik Kota Cirebon telah melakukan Konsensus dengan Polres Cirebon Kota, Kantor Kemenag, Kodim 0614/ Kota Cirebon. Konsensus ini diambil karena diperlukan penanganan bersama terkait persoalan tawuran antar sekolah.

"Karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh kami (Disdik) saja, maka kami beserta PGRI, Kantor Kementrian Agama, beserta Polres Ciko dan Kodim 0614 sudah melakukan konsensus tentang bagaimana menangkali tawuran ini," ungkap Irawan.

Sesuai dengan tugas, pokok, dan Fungsi dari tenaga pengajar, Disdik Kota Cirebon telah melakukan pembelajaran dengan pengembangan kurikulum Khususnya dengan Bimbingan Mental lewat Pendidikan Agama Islam Lanjut Irawan. Pengembangan Kurikulum tersebut bukan hanya bersifat Formal, tapi juga yang bersifat Informal.

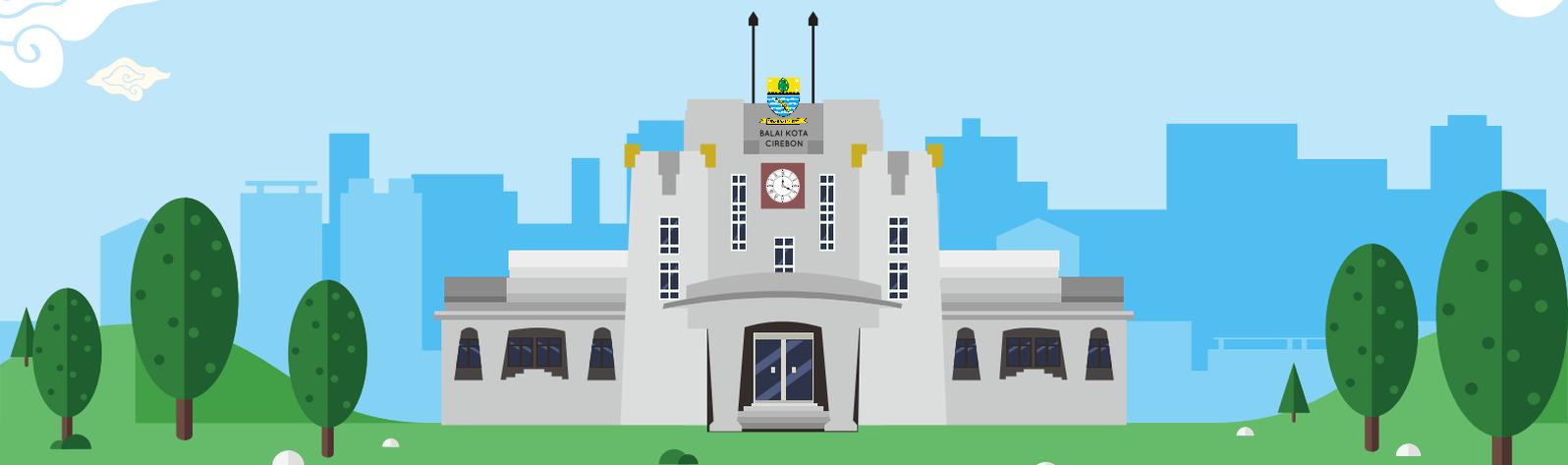
"Untuk Pengembangan pendidikan Agama Islam itu bukan hanya terpaku pada jam pelajaran yang telah ditentukan saja, misalnya sebelum pelajaran dimulai murid terlebih dahulu membaca Al-quran dan juga menggelar Shalar berjamaah," lanjut Irawan. **(Muslimin/Job/FC)**



Muslimin/FC.
SMPN 1 KOTA CIREBON BAKAL GELAR PENGAJIAN AKBAR. SMP Negeri 1 Kota Cirebon.



INFO HOAX





Laporan Isu Hoaks

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Sabtu, 25 Januari 2020

5. Informasi Jasa Pembuatan SIM Resmi Kepolisian dengan Daftar Harganya

15 hrs

Terima jasa pembuatan SIM asli dan resmi dari kepolisian proses hanya 1 hari, bagi yang diluar pulau Jawa 2 hari sudah bisa di terima

- #SIM C (400.000)
- #SIM A (500.000)
- #SIM B1 UMUM (950.000)
- #SIM B2 UMUM (1.250.000)

Bagi yang minat bisa hub wa : 085825078303
Aipda suhardi
Bagi yang berada di luar kota kami siap melayani melalui online
****TERIMAH KASIH****

Penjelasan :

Beredar pada media sosial informasi yang menyebutkan jasa pembuatan SIM resmi Kepolisian RI dengan mencantumkan daftar harga dan nomor telepon atas nama Aipda Suhardi.



Faktanya, informasi tersebut dibantah oleh Humas Polri melalui akun media sosial resminya dengan bantahan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar. Adapun biaya administrasi pembuatan SIM sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 34 Tahun 2004 tentang Tarif dan Jenis PNBP.

Hoaks





Laporan Isu Hoaks

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Sabtu, 25 Januari 2020

6. Himbauan Kemenkes RI Tentang Merebaknya Virus Influenza

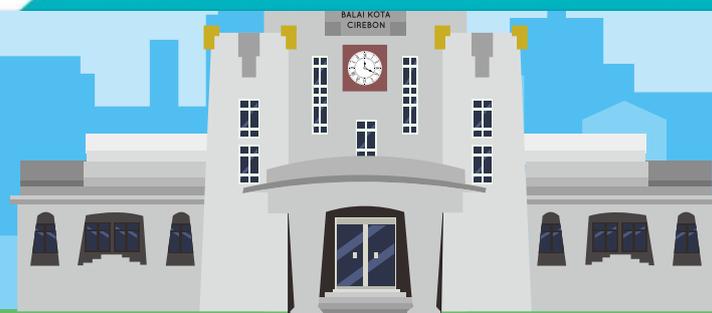


Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai pada platform Whatsapp, berupa himbauan yang mengklaim sebagai pesan dari Kementerian Kesehatan RI, himbauan tersebut menyebutkan bahwa Virus Influenza sedang merebak di Indonesia sampai maret 2020, maka diharapkan masyarakat agar menjaga kelembaban tenggorokan dan memakai masker bila keluar rumah.

Faktanya himbauan tersebut bukan dari Kemenkes RI, bahkan isi pesan berantai itu tidak memiliki sumber kredibel. Setelah ditelusuri, pesan berantai tersebut pertama menyebar di Singapura dan dibantah oleh Kementerian Kesehatan di Singapura yang menyatakan bahwa pesan tersebut adalah tidak benar.

Hoaks





GEMAH RIPAH LOH JINAWI

“ Sehat, Hijau, Agamis, Tenram dan Inovatif ”